

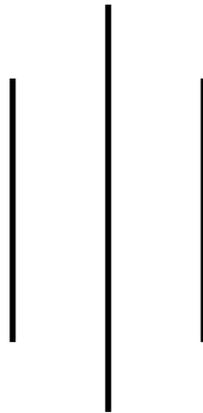


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2022



TAPAKTUAN, 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai pegangan bagi setiap SKPK dalam mengelola Keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBK Aceh Selatan 2022. Sesuai rencana kerja pembangunan Kab. Aceh Selatan Tahun 2022 mengusung tema perluasan dan percepatan pembangunan infrastruktur Dasar Daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis belum berjalan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan. Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Perubahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tapaktuan, 02 September 2021
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Aceh Selatan

DARWIS, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196907082000121007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintahan. Secara etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi (kehidupan) dan behavioral (perilaku), (Ndraha : 1987:1). Pengertian pembangunan sebagai suatu proses akan berkaitan dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo : 1985), proses sistemik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input yang merupakan bahan masukan konversi. Kedua, adanya proses konversi yaitu proses mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output yaitu hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Ketiganya akan saling berkaitan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak akan dapat berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Rencana Kerja ini akan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra ini akan memberikan pedoman perencanaan tahunan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPK merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra SKPK yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD sebagai input RKPK yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman penyusunan APBK.

Renja SKPK sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Renja SKPK merupakan penjabaran tahunan yang jika dikumpulkan akan disusun dalam Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPK adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

14. Undang-undang No.6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, maka rumusan perencanaan pembangunan harus disusun secara terpadu dan merata agar kegiatan pembangunan tetap sejalan dengan tujuan utama pembangunan. Pembangunan Daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja, baik yang berasal dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas serta hasil dari pendanaan lainnya.

Adapun penyusunan Renja dilakukan hanya terhadap program dan kegiatan, target kinerja, pagu indikatif dan kelompok sasaran dengan melakukan pergeseran Anggaran dan tidak menambah Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan. Adapun maksud penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh selatan khususnya di bidang pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar dalam pelaksanaan kegiatan memiliki panduan dan pedoman dengan tujuan dapat menentukan arah pembangunan ke depan yang lebih sempurna.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPK Tahun lalu dan capaian Renstra SKPK
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPK

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPK

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPK Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan Pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 dan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan, menjalankan 2 (dua) urusan guna memberikan pelayanan prima kepada public yaitu urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

Hasil Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPK tahun lalu dan pencapaian Kinerja Renstra SKPK.

Pelaksanaan program dan kegiatan Pada tahun 2018 jumlah APBK Aceh selatan yang di alokasikan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp. 2.908.122.287 yang terdiri dari Belanja tidak Langsung Sebesar Rp. 2.208.122.287. sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.815.615.408 atau 78.76% dan belanja langsung sebesar Rp. 700.000.000. dengan realisasi sebesar Rp. 673.326.887 atau 99.19%

Pada tahun 2019 jumlah APBK Aceh selatan yang di alokasikan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp. 2.809.552.639 yang terdiri dari Belanja tidak Langsung Sebesar Rp. 2.127.352.639. sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.070.418.984 atau 97.75% dan belanja langsung sebesar Rp. 682.200.000. dengan realisasi sebesar Rp. 656.174.971 atau 96.16 %

pada tahun 2020 jumlah APBK Aceh selatan yang di alokasikan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp. 2.613.628.953 yang terdiri dari Belanja tidak Langsung Sebesar Rp. 2.132.116.153. sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.107.691.888 atau 98.85% dan belanja langsung sebesar Rp. 481.512.800 dengan realisasi sebesar Rp. 472.083.095 atau 98.04 %

Perlu disampaikan bahwa dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti, atau kata lain semua kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPK

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan juga berfungsi sebagai :

- a). Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
- b). Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang kantor;
- c). Perumusan kebijakan teknis, program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d). Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- e). Pengelolaan, pengolahan bahan pustaka, arsip dan dokumen;
- f). Pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- g). Penyelenggaraan deposit, citra daerah, budaya baca dan khasanah arsip;
- h). Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i). Pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- j). Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- k). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Disamping berfungsi sebagai pengambil kebijakan teknis kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan juga berfungsi sebagai lembaga pembinaan pustakawan dan arsiparis baik tingkat kabupaten maupun kecamatan dan sekaligus sebagai pembina perpustakaan kecamatan dan pedesaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPK

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan menghadapi beberapa kendala, dimana kendala tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta capaian program, kendala dimaksud adalah Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPK

Dalam rangka pelayanan kearsipan dan layanan perpustakaan dengan semakin luasnya sasaran pelayanan perpustakaan dan kearsipan maka dengan sendirinya diperlukan adanya peningkatan kemampuan SDM dibidang perpustakaan dan

kearsipan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, serta diperlukan adanya peningkatan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Diperlukan langkah-langkah yang berkesinambungan untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan dan sosialisasi setiap kebijakan baru dibidang perpustakaan dan kearsipan serta tetap mengupayakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara berkala.

Dengan tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPK terkait, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk urusan Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). untuk urusan kearsipan dalam rangka pencapaian pelaksanaan program-program baik program-program pusat maupun program-program daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPK

Tingkat kinerja pelayanan SKPK dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPK. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1970.

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020 adalah.

a. Permasalahan dalam Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

- Belum adanya pelaksanaan pelatihan kearsipan yang diadakan di Kabupaten bagi tenaga pengelola arsip baik tenaga pengelola arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri maupun SKPK yang lainnya dalam Kabupaten Aceh Selatan.
- Belum adanya tenaga arsiparis dalam melaksanakan pembinaan diseluruh SKPK, Sekolah, Gampong maupun instansi swasta yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
- Belum memiliki gedung pengolahan dan penyimpanan arsip (Depo Arsip) dan

- Belum adanya tenaga arsiparis untuk SKPK-SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Permasalahan utama yang dihadapi pada urusan perpustakaan adalah :
- Alokasi anggaran peruntukkan perpustakaan masih minim sehingga perpustakaan gampong yang telah dibentuk tidak berjalan atau terkelola.
 - Kegiatan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan belum mencapai target karena kurangnya petugas fungsional khususnya pustakawan sehingga pembinaan yang dilaksanakan belum maksimal dan jumlah petugas yang belum memadai.
 - Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling, belum maksimal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah mobil keliling dan petugas, sedangkan sarannya seluruh sekolah SD/MI, SMP/MTsN, SMA/SMK/MAN yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

Dengan pelayanan dan penataan kearsipan yang benar sudah barang tentu akan sangat membantu kelancaran proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan dari tingkat gampong sampai di tingkat Kabupaten Aceh Selatan.

Sedangkan untuk urusan perpustakaan dengan tertatanya administrasi perpustakaan dan tersedianya koleksi bahan pustaka yang memadai, akan dapat lebih mengoptimalkan layanan perpustakaan sehingga berdampak terhadap peningkatan minat baca masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 dan sekaligus sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Aceh Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 1 butir 29 dan 30 disebutkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Nasional menggunakan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang disebut SIKN dan JIKN. SIKN dan JIKN merupakan arah kebijakan dibidang kearsipan sebagai tuntutan kemajuan teknologi yang diharapkan sistem ini dilaksanakan oleh semua kabupaten.

Untuk Teknologi Informasi Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan belum mempunyai Simpolak (Sistem Manajemen Pengelolaan Kearsipan) yang bisa diakses antar SKPK, untuk melaksanakan sistem itu dalam pelaksanaannya masih terkendala pada jaringan yang belum tersedia. Sedangkan untuk SIKN dan JIKN belum mampu dilaksanakan terkendala pada terbatasnya sarana prasarana.

Arah dan kebijakan Nasional dibidang Perpustakaan adalah adanya Perpustakaan Digital Nasional Indonesia atau yang disebut E.Library, meningkatkan akses layanan Perpustakaan dan pemerataan pelayanan perpustakaan di daerah terpencil. Dibidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan belum menggunakan Otomasi Perpustakaan karena masih terbatasnya sarana prasarana.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPK

a. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja adalah arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Sasaran

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima Meningkatnya sarana prasarana Perpustakaan dan Kearsipan
2. Meningkatnya minat dan budaya baca

Tabel 3.2
 Sasaran dan Indikator Kelompok sasaran
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan
 Tahun Rencana

Sasaran	Kelompok Sasaran
1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya SDM lulusan pendidikan perpustakaan dan kearsipan • Belum idealnya jumlah petugas pelayanan perpustakaan dan pengelola kearsipan • Belum adanya sarana dan ruang pengolahan dan penyimpanan arsip • Masih rendahnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan • Belum tertampungnya insentif untuk Pengurus Perpustakaan Gampong yang telah dibentuk
2. Meningkatnya minat dan budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pembinaan perpustakaan Gampong, Sekolah, Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah • Meningkatnya jangkauan pelayanan perpustakaan keliling • Meningkatnya koleksi bahan pustaka

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan bahan logistik.
- Penyediaan barang cetak dan penggandaan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

c. Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah.

- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN.

- Pengembangan Kekhasan koleksi bahan perpustakaan daerah tingkat Kabupaten/kota.
- Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota.
- peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota.
- pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota.
- pengelola dan pengembangan bahan pustaka.
-

a. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

- Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI.
- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan 2022 merupakan intisari dari program/kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam APBK Tahun 2022. Rencana Kerja ini selanjutnya akan dipakai acuan dalam menyusun pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program / kegiatan selama tahun 2022 dan juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait dengan pelaksanaan pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan ke Sekolah, Gampong dan SKPK-SKPK yang mungkin tidak akan dapat terlaksana secara maksimal, mengingat dana yang didapatkan kurang dari yang diharapkan. Untuk Pelayanan Perpustakaan keliling, kurangnya koleksi buku-buku perpustakaan, disamping itu dari SDM yang ada juga kurang untuk pelaksanaan pembinaan tersebut.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020.

Dalam kaitan itu, maka perlu dukungan masyarakat sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2022 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Tapaktuan, 02 September 2021
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Aceh Selatan

DARWIS, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196907082000121007

TABEL T-C.33
USULAN PROGRAM / KEGIATAN SKPK 2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2 23. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2. 23. 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur	Tapaktuan	100%	29,040,000	APBK		100%	36,000,000
2. 23. 01. 2. 05. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu <u>OUT COME</u> Meningkatnya disiplin aparatur	Tapaktuan	40 Stel	29,040,000	APBK		40 Stel	36,000,000
2. 23. 01. 2. 06	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Tapaktuan	100%	212,237,274	APBK		100%	312,512,504
2. 23. 01. 2. 06. 01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor <u>OUT COME</u>	Tapaktuan	1 Tahun	2,840,634	APBK		1 Tahun	5,940,500

		Meningkatnya instalasi dan penerangan gedung kantor							
2. 23. 01. 2. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Meningkatkan efektifitas dan Kinerja <u>OUT COME</u> Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Tapaktuan	1 Tahun	15,346,418	APBK		1 Tahun	7,098,898
2. 23. 01. 2. 06. 04	Penyediaan bahan logistik kantor	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya makanan dan minuman <u>OUT COME</u> Terpenuhinya makanan dan minuman	Tapaktuan	1 Tahun	9,463,652	APBK		1 Tahun	54,859,329
2. 23. 01. 2. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya barang cetak dan penggandaan <u>OUT COME</u> Terpenuhinya kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tapaktuan	1 Tahun	3,507,570	APBK		1 Tahun	14,428,709
2. 23. 01. 2. 06. 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya bahan Bacaan <u>OUT COME</u>	Tapaktuan	1 Tahun	6,270,000	APBK		1 Tahun	5,085,068

		Meningkatkan pengetahuan aparatur dan pengunjung							
2. 23. 01. 2. 06. 09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah <u>OUT COME</u> Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tapaktuan	1 Tahun	174,809,000	APBK		1 Tahun	225,100,000
2. 23. 01. 2. 07	Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tapaktuan	100%	233,237,560	APBK		100%	500,000,000
2. 23. 01. 2. 07. 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<u>Prasaranan Aparatur</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya Kendaraan dinas roda dua <u>OUT COME</u> Terwujudnya kendaraan dinas roda dua	Tapaktuan	3 Unit	44,000,000	APBK		3 Unit	75,000,000
2. 23. 01. 2. 07. 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya Sarana dan prasaaran gedung kantor <u>OUT COME</u> Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur	Tapaktuan	1 Tahun	189237560	APBK		50 Unit	425,000,000
2. 23. 01. 2. 08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Tapaktuan	100%	304,189,400			100%	297,610,987

2. 23. 01. 2. 08. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya Jasa Surat Menyurat <u>OUT COME</u> Terlaksananya kebutuhan jasa surat menyurat	Tapaktuan	1 Tahun	49,500,000	APBK		1 Tahun	47,999,240
2. 23. 01. 2. 08. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya Biaya rekening air, listrik dan internet <u>OUT COME</u> Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tapaktuan	1 Tahun	38,400,000	APBK		1 Tahun	79,840,320
2. 23. 01. 2. 08. 03	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor <u>OUT COME</u> Terpenuhinya Kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tapaktuan	1 Tahun	8,200,000	APBK		1 Tahun	6,675,000
2. 23. 01. 2. 08. 04	Penyediaan jasa Pelayan umum kantor	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Meningkatkan efektifitas dan Kinerja <u>OUT COME</u> Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Tapaktuan	1 Tahun	208,089,400	APBK		1 Tahun	163,096,427
2. 23. 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tapaktuan	100%	42,862,999	APBK		100%	46,470,000

		OUTCOME Terwujudnya Kualitasa pelayanan Perpustakaan Khusus							
2 23 02 2 01 06	peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	INPUT Dana OUTPUT Meningkatnya kapasitas pengelola perpustakaan OUTCOME Terwujudnya Kapasitas Pengelola Perpustakaan	Tapaktuan	25 Orang	0	APBK		24 Orang	50,000,000
2 23 02 2 01 07	pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	INPUT Dana OUTPUT Tersedianya sarana layanan perpustakaan OUTCOME Terpenuhinya sarana layanan Perpustakaan	Tapaktuan	4 Unit	0	APBK		4 Unit	60,000,000
2 23 02 2 01 09	pengeloala dan pengembangan bahan pustaka	INPUT Dana OUTPUT meningkatnya bahan koleksi perpustakaan OUTCOME Bertambahnya Bahan Koleksi Perpustakaan	Tapaktuan	2000 Eks	0	APBK		2000 Esk	200,000,000
2 23 02 2 02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Meningkatnya Pembudayaan Gemar membaca <u>OUT COME</u>	Tapaktuan	1 Kegiatan	0	APBK		1 Kegiatan	77,076,080
		Meningkatnya Jumlah pengunjung perpustrakaan							

2 23 02 2 02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Terlaksananya kegiatan sosialisasi budaya baca <u>OUT COME</u> Meningkatnya budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan serta masyarakat	Tapaktuan	1 Kegiatan	0	APBK		1 Kegiatan	77,076,080
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Tapaktuan	100%	0	APBK		100%	60,744,037
2 24 02 2 02 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya sarana Pengumpulan dan penyampaian Arsip <u>OUT COME</u> Terwujudnya sarana Pengumpulan dan penyampaian arsip	Tapaktuan	1 Kegiatan	0	APBK		1 Kegiatan	33,198,740
2 24 02 2 03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Tersedianya informasi, akses dan layanan kearsipan <u>OUT COME</u> Terwujudnya informasi, akses dan layanan kearsipan	Tapaktuan	1 App	0	APBK		1 App	27,545,297
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Tapaktuan	100%	0	APBK		100%	27,198,740

2 24 03 2 03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<u>INPUT</u> Dana <u>OUTPUT</u> Terdatanya dokumen <u>OUT COME</u> Terkelolanya arsip/dokumen daerah	Tapaktuan	1 Tahun	0	APBK	1 Tahun	27,198,740
Jumlah					821,567,233			1,757,612,348

Tapaktuan, 02 September 2021
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Aceh Selatan

(DARWIS, S.Pd.,M.Pd)
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690708 200012 1 007